

EFEKTIVITAS PROMOSI PROGRAM B2SA DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI 5 WILAYAH SUMATERA SELATAN

SUHAILA¹, YUSLAINIWATI², LASMI YAMIN³, M. SUTALHIS⁴, EVA NOVARIA⁵
BPSDMD Prov Sumatera Selatan^{1,2,4,5}, DKPP Prov. Sumsel³
e-mail: talhis007@gmail.com

ABSTRAK

Penganekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan pola konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dewasa ini menjadi salah satu focus perhatian pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan baik pada level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ketahanan pangan merujuk pada keadaan dimana semua orang memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang meliputi aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Pola konsumsi pangan menjadi sangat penting terutama baik bagi kalangan Ibu hamil maupun menyusui dalam upaya pencegahan stunting. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang pola makan B2SA terhadap implementasi pola makan kesehariannya. Dari lima wilayah yang ada di Sumatera Selatan, ternyata dari strategi komunikasi dengan cara edukasi dengan penyuluhan langsung, pengetahuan dan kesadaran tentang pangan B2SA dikatakan meningkat terbukti hasil posttest yang mengarah kepada kepuasan masyarakat dari edukasi yang diterima mereka.

Kata kunci : B2SA, stunting, ketahanan pangan, pola pangan harapan

ABSTRACT

Diversifying food consumption by cultivating diverse, nutritious, balanced and safe (B2SA) food consumption patterns is currently one of the focuses of government attention in the field of food security at both the central government and regional government levels. Food security refers to a situation where all people have physical, social and economic access to food which includes aspects of availability, accessibility, utilization and stability. Food consumption patterns are very important, especially for pregnant and breastfeeding mothers, in efforts to prevent stunting. This research was carried out by distributing questionnaires and interviews to find out the extent of people's knowledge about the B2SA diet regarding the implementation of their daily diet. From the five regions in South Sumatra, it turns out that from the communication strategy by means of education with direct counseling, knowledge and awareness about B2SA food is said to have increased as proven by the posttest results which lead to community satisfaction from the education they received.

Key words: B2SA, stunting, food security, hopeful food patterns

PENDAHULUAN

Amanat Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 60 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkepentingan dalam mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan dengan membudayakan pola konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, berbasis pada potensi sumber daya lokal. Makna Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Pangan beragam diartikan terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Asupan makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga kebutuhan gizi kita dapat

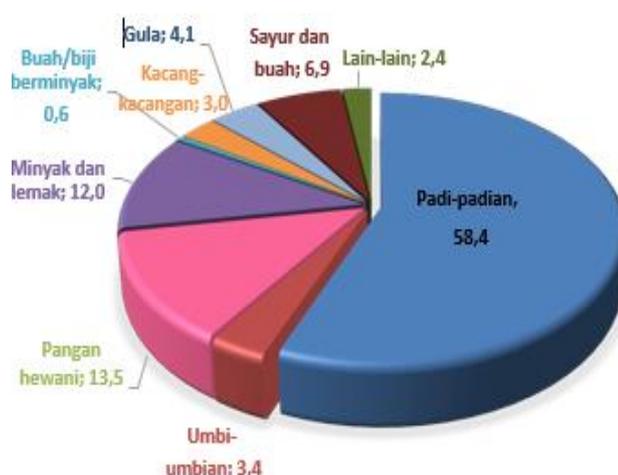
terpenuhi. Bergizi diartikan mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Seimbang bermakna dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan memperhatikan proporsinya sesuai dengan takarannya. Aman bermakna harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik.

Upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan antara lain melalui : (a) mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan; (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; (c) meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan (d) mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal. Promosi Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dilakukan beranekaragam cara melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, media sosial, maupun media luar ruang. Promosi juga bisa dilakukan melalui *direct communication* misalnya gerakan, kampanye, pameran, *pilot project* ataupun sarana percontohan, dan lain- lain.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi selalu menjadi program prioritas dalam setiap pembangunan nasional, yang ditandai dengan dijadikannya beberapa indikator kualitas dan kuantitas konsumsi seperti konsumsi energi, protein dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai indikator pencapaian pembangunan nasional. Pola Pangan Harapan (PPH) mengukur pola konsumsi pangan yang menggambarkan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang, dengan skor ideal 100. Berikut sasaran strategis konsumsi pangan secara nasional.

Tabel 1 Sasaran Strategis Konsumsi Pangan Nasional

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi energi (Kkal/kap/hari)	2.113	2.150	2.150	2.100	2.100
Konsumsi protein (gram/kap/hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Skor PPH	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2



Gambar 1. Persentase Skor PPH Provinsi Sumsel 2023

Gambar 1. Memperlihatkan bahwa meskipun skor PPH Sumsel tinggi 94,5 dari standar 100 atau 94 dari Renstra Nasional , grafik menunjukkan bahwa masyarakat Sumsel kurang

konsumsi umbi-umbian dan kacang. Sedangkan untuk konsumsi padi-padian, minyak dan lemak sudah melebihi konsumsi.

Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi kendala dalam penerapan B2SA untuk merancang program promosi B2SA yang efektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip B2SA. Mengetahui hubungan antara penerapan prinsip B2SA dengan pengetahuan tentang pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman *Studi sebelumnya yang menjadi rujukan penelitian tentang efektivitas program promosi B2SA*, bahwa masalah yang menyebabkan kejadian stunting yaitu status ekonomi keluarga yang rendah. Asupan zat gizi yang penting, terutama dari total energi, protein, lemak dan zat gizi mikro, berhubungan dengan defisit pertumbuhan fisik pada anak. Metode kegiatan dilakukan selama 1 bulan dengan memberikan penyuluhan mengenai stunting dan gizi balita, pemberian PMT berbasis kearifan lokal dan cooking class. Hasil memperlihatkan bahwa setelah penyuluhan dilakukan, tingkat pengetahuan ibu mengenai gizi dan pencegahan stunting meningkat. Madureso memiliki jumlah balita 268 dengan total penderita stunting 42,7% atau sebanyak 113 balita. Hal ini dimungkinkan tingkat pemahaman ibu balita yang kurang terhadap gizi balita sehingga Masyarakat Desa Madureso juga memiliki tingkat pendidikan yang menengah kebawah dan tingkat social ekonomi yang masih kurang dilihat dari mata pencaharaian yang rata-rata menjadi buruh tani, dan sale pisang. (Astuti et al., 2020)

Berbicara tentang Ketahanan pangan ini meliputi aspek; ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability) yang erat kaitannya dengan kondisi kesehatan seseorang ataupun masyarakat (FAO, 2006). Tanpa ketahanan pangan yang baik, sulit bagi suatu negara untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan diantaranya perubahan iklim global, kerusakan lingkungan (Schmidhuber dan Tubiello, 2007; Altieri dan Nicholls, 2013; Fowler dan Westengen, 2019), dan alih fungsi lahan (UN, 2015) yang berimbas pada ketersediaan pasokan pangan. Kondisi tersebut juga berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi pangan ditingkat wilayah maupun rumah tangga (kerawanan pangan). Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada masa tertentu (kronis) maupun dalam keadaan darurat seperti bencana (transien) (DKP, 2006) (Rohmatullayaly et al., 2021)

Pangan Bergizi: Makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Nutrisi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pangan Seimbang: Konsumsi berbagai jenis makanan dalam jumlah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Tidak hanya fokus pada satu jenis makanan saja, tetapi menggabungkan berbagai kelompok makanan. Sedangkan Pangan Aman adalah makanan yang bebas dari kontaminan berbahaya seperti bakteri, virus, parasit, atau zat kimia yang dapat menyebabkan penyakit. Program ketahanan pangan bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencegah kelaparan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi

Masalah gizi yang masih terjadi di Indonesia misalnya stunting, penyebabnya karena kebiasaan makan yang buruk pada peserta penyuluhan sebagian besar (>80%) dipengaruhi oleh kebiasaan yang terbentuk dari orang tua yang tidak terbiasa menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi (B2SA). Kebiasaan inilah yang membentuk perilaku keluarga yang tidak terbiasa makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Salah satu dampak dari tidak konsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi adalah terjadinya masalah kekurangan asupan gizi sehingga munculnya kasus gizi kurang dan stunting (Picauly et al., 2023)

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk

perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Ada beberapa komponen untuk menentukan Pola Pangan Harapan yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. (Fadhilah et al., 2021)

Kaitan Antara Pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan pola pangan harapan yaitu Pangan bergizi, seimbang, dan aman merupakan komponen penting dalam program ketahanan pangan. Berikut adalah beberapa kaitannya:

- a. Peningkatan Status Gizi: Dengan menyediakan akses terhadap pangan bergizi dan seimbang, program ketahanan pangan dapat meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
- b. Pencegahan Penyakit: Konsumsi pangan yang aman dan bergizi dapat mencegah berbagai penyakit seperti stunting, wasting, obesitas, dan penyakit tidak menular lainnya.
- c. Peningkatan Produktivitas: Masyarakat yang sehat dan berenergi karena mengonsumsi makanan bergizi akan lebih produktif dalam bekerja dan belajar.
- d. Peningkatan Ketahanan Ekonomi: Program ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha pangan, serta memperkuat ekonomi lokal.

Implementasi Program Ketahanan Pangan, untuk mewujudkan program ketahanan pangan yang efektif, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Diversifikasi Produksi Pangan: Meningkatkan produksi berbagai jenis pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
- b. Peningkatan Kualitas Produksi: Menerapkan praktik pertanian yang baik untuk menghasilkan pangan yang aman dan bergizi.
- c. Peningkatan Akses: Memastikan semua masyarakat memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap pangan bergizi.
- d. Pendidikan Gizi: Melakukan kampanye dan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memilih makanan yang sehat.

Beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi program ketahanan pangan, seperti:

- a. Kemiskinan: Masyarakat miskin seringkali kesulitan untuk mengakses pangan bergizi.
- b. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kekurangan pangan.
- c. Kurangnya Infrastruktur: Infrastruktur yang buruk dapat menghambat distribusi pangan.

Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi:

- a. Faktor individu (pengetahuan, sikap, kebiasaan).
- b. Faktor sosial ekonomi (pendapatan, pendidikan).
- c. Faktor lingkungan (ketersediaan pangan, harga).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di 5 (lima) wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi; pertama melakukan persiapan proses kegiatan melalui koordinasi dengan mitra, koordinasi dengan bidan desa dan kader, penentuan jadwal bersama, pembuatan media gambar, kuesioner dan leaflet. Pada tahap pelaksanaan kegiatan meliputi 1). Pengukuran pengetahuan awal mengenai gizi balita. Pemberian materi penyuluhan mengenai Pola pangan harapan dan pangan B2SA, selanjutnya dilakukan posttest pada peserta penyuluhan edukasi kegiatan B2SA. (Astuti et al., 2020)

Setelah mendapatkan hasil dari penilaian pretest dan posttest dianalisis dengan membandingkan dengan referensi yang terkait masalah dan data-data rujukan, serta melakukan wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan hasil dari penilaian pretest dan posttest dianalisis dengan membandingkan dengan referensi yang terkait masalah dan data-data rujukan, serta melakukan wawancara yang berkaitan kegiatan dimaksud.

Tabel 2. Nilai Evaluasi Kuisioner berkaitan pengetahuan Pola Pangan Harapan

No	KABUPA TEN	Pre test			Post test		
		Sangat memu askan	Memuas kan	Kurang	Sangat memuas kan	Memuas kan	Kurang
1	Muratara	1 %	33 %	66 %	23 %	28 %	48 %
2	Pali	9 %	50 %	41 %	35 %	52 %	13 %
3	Lubuk Linggau	22 %	43 %	35 %	5 %	29 %	66 %
4	Musi Rawas	5 %	39 %	56 %	33 %	51 %	16 %
5	OKU Selatan	12 %	44 %	44 %	41 %	42 %	17 %

Sumber Data : Survei Pengetahuan B2SA di 5 Wilayah Sumsel Tahun 2024

Keterangan :

Sangat memuaskan ≥ 80

Memuaskan = 60 -80

Kurang ≤ 50

Karakteristik Responden pada penelitian ini adalah masyarakat desa dan siswa sekolah di lima kabupaten Muratara, Pali, Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan OKU Selatan. Pada Hasil evaluasi terlihat ada peningkatan pengetahuan pada Kabupaten Musi Rawas dari 56 % nilai kurang, yang nilai kurang menjadi 16 %, ada peningkatan yang sebelumnya nilai kurang dari 50, peserta yang nilainya kurang dari 50 berkurang 40%. Peserta evaluasi Kabupaten Pali juga meningkat pengetahuannya dari yang nilai kurang dari 50 sebanyak 41% setelah sosialisasi yang nilainya kurang dari 50 menjadi 13%. Kabupaten OKU Selatan mengalami peningkatan nilai hasil posttest nilai kurang dari 50 turun dari 44% menjadi 17%. Soal pada pretest dan posttest berhubungan dengan pangan bergizi, seimbang, dan aman.

Sebagai perbandingan hasil penelitian sebelumnya oleh Astuti dan kawan-kawan tahun 2020, pengetahuan Masyarakat Desa Madureso sebelum penyuluhan kurang 11 orang (29,7%), cukup 24 orang (64,9%) dan baik 2 orang (5,4%). Pengetahuan setelah kegiatan baik 27 orang (72,9%) dan pengetahuan cukup 10 orang (27,1%) (Astuti et al., 2020)

Diskusi temuan penelitian :

Melihat dari tabel berikut, Kabupaten yang dijadikan objek penelitian termasuk kabupaten yang mengalami peningkatan Jumlah Balita Stunting, informasi dari kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten yang mendapat bantuan anggaran kegiatan B2SA adalah Kabupaten Pali, Musi Rawas, dan OKU Selatan, masing-masing mendapat transfer dana kegiatan B2SA sebesar Rp. 60.000.000,00 yang ditransfer ke Rekening Tim Penggerak PKK Desa masing-masing Kabupaten tersebut, dana itu digunakan untuk pembelian alat masak, alat makan, bahan makanan, serta untuk kegiatan

edukasi dan promosi kegiatan B2SA. Tim Penggerak PKK desa memberikan makanan yang telah siap untuk dimakan oleh ibu hamil dan balita untuk mencegah bertambahnya jumlah balita stunting, desa yang menjadi objek pendistribusian bantuan pangan itu sebanyak 40 orang. Jika memandang dari strategi komunikasi dengan cara edukasi dengan penyuluhan langsung pengetahuan dan kesadaran tentang pangan B2SA dikatakan berhasil terbukti hasil posttest yang sangat memuaskan, tetapi apakah dengan meningkatnya pengetahuan akan meningkatkan aksi penerapan pola konsumsi pangan B2SA, masih perlu observasi lebih lanjut. Desa di Pali memiliki potensi hasil perkebunan yaitu kopi dan buah jeruk madu, sedangkan untuk desa Gemiung di Kabupaten OKU Selatan potensi pariwisata yaitu Danau Kasmaran, yang penulis dapat dari penelusuran internet.

**Tabel 3. Yang mengalami perubahan prevalensi balita stunting
 Di provinsi sumatera selatan**

NO	KABUPATEN/KOTA	STUNTING SSGI 2022	STUNTING SKI 2023	GAP SSGI 2022 DAN SKI 2023
1.	OKU	19,9	15,7	-4,2
2.	OKI	15,1	32,5	17,4
3.	MUARA ENIM	22,8	25,9	3,1
4.	LAHAT	19,0	7,8	-11,2
5.	MUSI RAWAS	25,4	21,9	-3,5
6.	MUSI BANYUASIN	17,7	16,5	-1,2
7.	BANYU ASIN	24,8	20,4	-4,4
8.	OKU SELATAN	19,4	23,0	3,6
9.	OKU TIMUR	19,1	9,3	-9,8
10.	OGAN ILIR	24,9	22,9	-2,0
11.	EMPAT LAWANG	18,5	32,6	14,1
12.	PALI	14,6	15,4	0,8
13.	MURATARA	20,2	33,1	12,9
14.	PALEMBANG	14,3	18,9	4,6
15.	PRABUMULIH	12,3	15,4	3,1
16.	PAGAR ALAM	11,6	23,3	11,7
17.	LUBUKLINGGAU	11,7	17,5	5,8
	SUMATERA SELATAN	18,6	20,3	1,7

Sumber Data : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022
 Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Penelitian Manajemen Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan dapat disimpulkan yaitu program pekarangan pangan lestari yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani Asih Munggaran sudah optimal menciptakan pola pangan beragam berbasis pangan lokal di masyarakat desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang dengan memaksimalkan pekarangan pangan lestari. Terbukti meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah pangan lokal sebagai alternatif pangan selain beras. Terciptanya konsumsi pangan ideal yang beragam, bergizi, seimbang serta adanya peningkatan pendapatan rumah tangga tani di desa tersebut dan juga telah membantu peningkatan pola pangan harapan di Kabupaten Karawang. Peningkatan pola pangan harapan tidak terlepas dari koordinasi yang bersinergi antara lembaga, pemerintah swasta, pemerintah desa dan masyarakat. Kurangnya pemanfaatan lahan untuk budidaya ternak ikan sebagai pemenuhan gizi seimbang yang masih minim dikarenakan melihat potensi wilayah Kecamatan Telagasari yang didominasi lahan pertanian mengakibatkan minimnya budidaya ternak hewan seperti ikan untuk pemenuhan gizi seimbang (Fadhilah et al., 2021)

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan ini menunjukkan pertama, implementasi kebijakan berpengaruh sebesar 90,3 % terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut di dukung pernyataan dengan nilai validitas tertinggi adalah pernyataan ketiga belas yakni indikator unsur pemerintah terkait (0,584), pernyataan pertama indikator sosialisasi kebijakan berupa peraturan perundang- undangan sebesar (0,581) dan pernyataan ketiga indikator manfaat kebijakan sebesar (0,581). Sedangkan nilai validitas terendah adalah pernyataan kedelapan indikator Standar Operasional Prosedur sebesar (0,184). Kedua, Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh sebesar 99,2% terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai validitas tertinggi adalah pernyataan keempat indikator usaha/industri rumah tangga sebesar (0,592), pernyataan ketiga belas IPM indikator sopan santun sebesar (0,574), dan pernyataan kedua indikator kemampuan memecahkan masalah sebesar (0,553). Sedangkan nilai validitas terendah adalah pernyataan kedelapan indikator inovasi keaslian peninggalan sejarah leluhur sebesar (0,229). Ketiga, implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh sebesar 99,2% terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pernyataan dengan nilai validitas tertinggi adalah pernyataan keempat indikator persentase desa yang tidak punya akses penghubung yang memadai sebesar (0,596), pernyataan ketiga belas indikator persentase daerah puso/kemungkinan gagal panen sebesar (0,579), dan indikator pertama ketersediaan pangan meningkat sebesar (0,573). Adapun nilai validitas terendah adalah pernyataan kedelapan sebesar (0,231) (Apriyanto et al., 2023)

Penerapan program ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum optimal hal tersebut karena pertama, Kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, Program Lumbung Pangan yang di program masih mengalami kendala, seperti kurang aktifnya lumbung pangan karena kurangnya dana operasional program. Ketiga, Program Toko Tani sebagai Pasar penyeimbang belum berjalan secara optimal karena di lapangan ditemukan oleh peneliti, Toko Tani belum memiliki Tempat Khusus, masih menggunakan Rumah pribadi milik PPL serta sikap masyarakat yang tidak mau tau dengan adanya toko tani tersebut, hal tersebut karena barang-barang di toko tani selain tidak variatif, jumlahnya yang sedikit sehingga membuat toko tani kurang di minati oleh masyarakat sekitar, selain itu masih banyak petani yang menjual hasil pertanian kepada tengkulak dibandingkan kepada pemerintah, sehingga mengakibatkan permainan harga di pasar yang lebih banyak menguntungkan para tengkulak di bandingkan para petani. Faktor-faktor pendukung : yaitu adanya perluasan daerah pertanian, adanya situs web online tentang ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, kerjasama yang baik dari Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Terkait, dan adanya SOP (Standard Operating Procedures) (Natalia Vera, 2021)

Ketahanan pangan merujuk pada keadaan dimana semua orang memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang meliputi aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Saat ini, pandemi Covid-19 menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan telah menambah angka kekurangan gizi penduduk. Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PPM) ini dilakukan dengan metode kualitatif (wawancara dan observasi) guna mengeksplorasi potensi desa termasuk sumber daya alamnya, serta sosialisasi untuk penyadartahuan dan pemberdayaan masyarakat baik petani berskala kecil maupun ibu rumah tangga. Masyarakat Desa Sukamenak dahulunya bermata pencaharian sebagai petani, becocok tanaman padi (*Oryza sativa*) dan tembakau (*Nicotiana tabacum*). Saat ini, dikarenakan adanya alih fungsi lahan menjadi Waduk Jatigede. Masyarakat juga mulai beralih ke sektor pariwisata dengan menyediakan jasa sewa perahu rakit untuk memancing ikan di Waduk Jatigede (Rohmatullayaly, E. N., Irawan, B., & Iskandar, J. 2021)

Proses Implementasi kebijakan ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan di atur dalam Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi sebagai kebijakan turunan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan implementasi kebijakan ketahanan pangan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kebijakan ketahanan di wilayahnya masih-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standard dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan dilakukan dengan mempermudah masyarakat dalam hal ketersediaan dan akses pangan bagi kebutuhan sehari-hari serta adanya pengembangan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan serta tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat petani. Permasalahan terkait sarana dan prasarana seperti permasalahan mengenai penggunaan lahan, Dinas Pangan dan pemerintahan nagari berkoordinasi dengan pemilik tanah agar mau menghibahkan tanahnya untuk dibangunnya tempat penyimpanan (lumbung) pangan bagi masyarakat, yang pemilik tanah pun merangkap menjadi ketua pengurus cadangan pangan masyarakat. (Rahmi et al., 2020)

KESIMPULAN

Implementasi Program Ketahanan Pangan, Pangan bergizi, seimbang, dan aman merupakan pilar penting dalam program ketahanan pangan. Dengan mengimplementasikan program yang komprehensif dan berkelanjutan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Kegiatan Edukasi terkait Pangan B2SA telah dilaksanakan dengan baik dan telah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta edukasi tersebut pada 5 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengetahui apakah kesadaran dan pemahaman tentang pangan B2SA telah diterapkan masyarakat yang mendapatkan edukasi perlu observasi lanjutan sehingga tujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang aktif, sehat dan produktif dapat tercapai. Hambatan dalam penerapan Pola Pangan Harapan antara lain kesulitan mengubah pola pikir masyarakat yang telah membudaya makan tidak sesuai prinsip B2SA, kebiasaan makan pangan instan, serta belum memiliki motivasi untuk memanfaatkan pangan local yang berasal dari pekarangan atau hasil pertanian lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan, kiranya masih diperlukan upaya-upaya untuk menerapkan prinsip B2 SA di wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara keseluruhan dengan menerapkan promosi dan strategi komunikasi yang sesuai dengan kondisi wilayah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., Satriawan, K. N., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361–368. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.510>
- Astuti, D. P., Utami, W., & Sulastri, E. (2020). Pencegahan Stunting Melalui Kegiatan Penyuluhan Gizi Balita Dan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Kearifan Lokal Di Posyandu Desa Madureso. *University Research Colloquium*, 74–79.
- Fadhilah, N. I., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Manajemen Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.35724/sjias.v10i1.3425>
- Natalia Vera. (2021). Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 23–31. <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i1.1129>

- Picauly, I., Sakke Tira, D., & Pellokila, M. (2023). Pentingnya Pola Makan Beragam, Bergizi, Seimbang, Dan Aman Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering*, 4(1), 9–17. <https://doi.org/10.51556/jpkmkelaker.v4i1.235>
- Rahmi, H., Ilmu, J., Publik, A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2020). *Implementasi Kebijakan, Ketahanan Pangan, Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan*. 1(1), 51–59.
- Rohmatullayaly, E. N., Irawan, B., & Iskandar, J. (2021). Eksplorasi Potensi Desa Sukamenak Untuk Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Dharmakarya*, 10(2), 96. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i2.31985>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan